

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun :

2 0 2 0



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman :

03

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan ✓	

Aset Daerah Banyak Dibawa Pejabat

■ Pemprov Gandeng Kejaksaan untuk Penertiban

PALANGKA RAYA – Persoalan aset masih menjadi perhatian, terlebih dengan adanya pengalihan sejumlah kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, seperti sektor Pertambangan, kehutanan, pendidikan SMK/SMA dan SLB, serta sejumlah kewenangan lainnya.

Bahkan, ada juga aset-aset tersebut yang dibawa pejabat yang mutasi atau pensiun. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalteng menertibkan aset tersebut dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat.

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, di Aula Inspektorat Provinsi Kalteng, Senin (10/2), mengatakan, un-

tuk penertiban aset ini, selama ini diminta bantu dengan Satpol PP, namun ke depan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalteng.

Dalam tahun ini akan dilakukan penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi Kalteng dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi

Kalteng.

Dengan adanya kerja sama ini, ujar Fahrizal, aset-aset yang masih dikuasai oleh oknum, apabila sudah dilakukan pendekatan komunikasi namun juga tidak selesai, maka akan diproses melalui pengadilan.

“Untuk aset-aset pemerintah daerah yang masih dikuasai oleh ok-

num, apabila dilakukan pendekatan komunikasi namun juga tidak selesai, maka selanjutnya akan diproses melalui pengadilan,” ujarnya.

Karena terkait aset yang dibawa pejabat yang mutasi ataupun pensiun ini, ujar Fahrizal, sudah beberapa kali membuat surat edaran untuk meminta agar aset-aset terse-

but dikembalikan.

Ia juga minta kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar betul-betul mencermati aset yang bergerak atau berpindah yang tidak sesuai jabatannya di lingkungannya masing-masing. Termasuk juga aset-aset yang dibawa mutasi, karena yang bersangku-

tan pindah ketempat lain atau pensiun.

Lebih lanjut Fahrizal mengatakan, dalam kerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalteng tersebut, selain akan bicara mengenai penertiban aset, namun pihaknya juga akan berbicara tentang retribusi dan pajak daerah, serta penertiban perizinan. ☑dkw